

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, *FISCAL STRESS*, DAN  
KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI**

Sang Made Muryawan<sup>1</sup>

Made Sukarsa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

Email: mademuryawan@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal dan *fiscal stress* terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, baik secara langsung maupun melalui kinerja keuangan daerah. Data penelitian merupakan data sekunder yang diambil dari publikasi Kemenkeu, BPS dan Bappeda masing-masing kabupaten/Kota di Bali, selanjutnya variabel dianalisis dengan mempergunakan analisis jalur yang bertujuan untuk dapat mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel pada model penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal dan *fiscal stress* secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, variabel desentralisasi fiskal dan *fiscal stress* secara tidak langsung berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kinerja keuangan daerah, dan variabel kinerja keuangan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam era desentralisasi fiskal pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya, dengan cara pengembangan aktivitas ekonomi di berbagai bidang dan berbasis komoditi unggulan daerah, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan asli daerah dan disertai dengan kinerja keuangan yang efisien.

**Kata kunci** : Desentralisasi fiskal, Fisca Stress, Kinerja keuangan, Pertumbuhan Ekonomi

**ABSTRACT**

This study was conducted examine the effect of fiscal decentralization and fiscal stress economic growth in the province of Bali, either directly or through a local financial performance. The research data is secondary data taken from publications of Ministry of Finance, BPS and Bappeda each regency / city. The variables analyzed using path analysis to determine the direct and indirect influence of the variables the research model . The results of this analysis revealed that fiscal decentralization variable indirectly and fiscal stress variables affects economic growth significantly through regional financial performance , fiscal decentralization variables and fiscal stress directly influence economic growth , and financial performance variables significantly influence economic growth.To promote economic growth in an era where the area of fiscal decentralization, local governments are expected to increase their fiscal capacity, through the development of commodity-based economic activity, the intensification and expansion of revenue and efficient financial performance.

**Keywords** : Fiscal decentralization, Financial Performance, Fiscal stress,,Economic growth

## PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2001 telah melaksanakan otonomi daerah yang tentunya memerlukan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerataan ekonomi Bali antar Kabupaten/Kota hingga kini masih menjadi pekerjaan bersama antara pemerintah provinsi dan kab/kota. Kontribusi ekonomi kab/kota sentral terus mendominasi bahkan kontribusinya mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota provinsi Bali setiap tahunnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif tetapi kalau dilihat antara kabupaten/kota di provinsi Bali masih terjadi perbedaan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada Kabupaten Badung yaitu 7,30 persen dan yang terendah di Kabupaten Karangasem yang mencapai 5,73 persen (Tabel 1).

**Tabel 1**

### **Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**

| Kab/Kota Provinsi | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Buleleng          | 4,06 | 4,84 | 4,98 | 5,60 | 5,35 | 5,82 | 5,84 | 6,10 | 5,85 | 6,11 | 6,52 |
| Jembrana          | 3,06 | 3,58 | 4,86 | 5,00 | 4,52 | 5,11 | 5,05 | 4,82 | 4,57 | 5,61 | 5,90 |
| Tabanan           | 4,54 | 4,91 | 4,73 | 5,96 | 5,25 | 5,76 | 5,22 | 5,44 | 5,68 | 5,82 | 5,91 |
| Badung            | 3,90 | 3,00 | 5,78 | 5,61 | 5,03 | 6,85 | 6,91 | 6,39 | 6,48 | 6,69 | 7,30 |
| Gianyar           | 3,48 | 3,33 | 4,95 | 5,47 | 5,20 | 5,89 | 5,90 | 5,93 | 6,04 | 6,76 | 6,79 |
| Bangli            | 3,03 | 3,38 | 4,03 | 4,46 | 4,25 | 4,48 | 4,02 | 5,71 | 4,97 | 5,84 | 5,99 |
| Klungkung         | 5,53 | 3,10 | 4,67 | 5,41 | 5,03 | 5,54 | 5,07 | 4,92 | 5,43 | 5,81 | 6,03 |
| Karangasem        | 3,09 | 4,05 | 4,49 | 5,13 | 4,80 | 5,20 | 5,07 | 5,01 | 5,09 | 5,19 | 5,73 |

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Denpasar | 5,03 | 5,31 | 5,83 | 6,05 | 5,88 | 6,60 | 6,83 | 6,53 | 6,57 | 6,77 | 7,18 |
| Bali     | 3,04 | 3,57 | 4,62 | 5,56 | 5,28 | 5,92 | 5,97 | 5,33 | 5,83 | 6,49 | 6,65 |

Sumber : Bappeda Kab/Kota Provinsi Bali

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat PDRB per kapita tertinggi Kabupaten Badung mencapai Rp. 32,85 juta per tahun dan yang terendah di Kabupaten Karangasem yang mencapai Rp. 12,77 juta per tahun. Todaro (2003) mengatakan bahwa apabila laju pertumbuhan secara material meningkat maka keberhasilan pembangunan akan tercapai, namun akan muncul permasalahan pemerataan hasil pembangunan. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa di Cina, Korea Selatan, Taiwan, Sri Lanka Dan Costa Rika membuktikan bahwa meningkatnya pendapatan daerah akan disertai dengan terus melebarnya disparitas pembangunan. Ketimpangan daerah apabila dibiarkan akan memperlebar jurang pembangunan antara daerah kaya dan daerah miskin sehingga menyebabkan terjadinya migrasi dari daerah miskin ke daerah kaya. Daerah memiliki berbagai perbedaan potensi yang dimiliki baik potensi alam, infrastruktur, sumber daya manusia dan investasi, sehingga hal ini menyebabkan kesenjangan pendapatan (Bendesadkk, 2011).

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, kemampuan keuangan suatu daerah merupakan salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi. Pemerintah Daerah diberikan kemampuan dan kewenangan untuk menggali setiap potensi daerahnya agar daerah memiliki sumber-sumber penerimaan daerahnya untuk membiayai pengeluaran pembangunan pemerintah daerahnya. Daerah yang mempunyai pendapatan yang cukup besar dan independen akan mempunyai posisi yang lebih baik dari pada yang tergantung

dari dana Pemerintah Pusat. Sebab dengan pembiayaan yang lebih banyak diperoleh dari usaha sendiri, maka pemerintah daerah akan lebih fleksibel dalam mengelola keuangannya. Oleh karena itu, daerah yang lebih mandiri merupakan dambaan dari setiap pemerintah daerah. Untuk dapat melihat apakah kabupaten/kota bisa melaksanakan otonomi dengan baik dapat dilihat dari besarnya derajat desentralisasi fiskal (DDF), yaitu dengan menggunakan variabel pokok kemampuan keuangan daerahnya.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah pemerintah kabupaten/kota di provinsi bali dituntut untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya agar kemandirian dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Adanya tekanan fiskal sejak diberlakukannya otonomi daerah karena dengan adanya kewenangan daerah untuk mengelola keuangan sendiri dan daerah harus dituntut untuk lebih mandiri sehingga Pemerintah di kabupaten/kota Provinsi Bali lebih intensif dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah.

Adanya masalah pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditunjukkan pada fenomena yang dialami kabupaten/kota di Provinsi Bali apabila tidak ditindaklanjuti dengan cepat menyebabkan masalah makro ekonomi dalam jangka panjang karena pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Ada tiga alasan yang mendasarinya : Pertama, bertambahnya jumlah penduduk. Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka akan berdampak bertambahnya jumlah angkatan kerja. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka angkatan kerja bisa terserap atau bisa menyediakan lapangan

pekerjaan. Kedua, selama kebutuhan dan keinginan selalu tidak terbatas. Ketiga, usaha untuk menciptakan pemerataan ekonomi.

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan *fiscal stress* secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, dan secara tidak langsung melalui kinerja keuangan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi atau menyediakan kebutuhan barang dan jasa kepada masyarakatnya sehingga memungkinkan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjelaskan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, penambahan jumlah sarana pendidikan, infrastruktur, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi, dan berbagai perkembangan lainnya.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Dalam organisasi pemerintah ada beberapa ukuran kinerja untuk mengukur kinerja keuangan yaitu rasio pertumbuhan, rasio efisiensi, rasio efektifitas, rasio kemandirian, dan rasio keserasian. Rasio efisiensi digunakan

dalam penelitian ini karena dilihat fenomena setiap tahunnya pemerintah daerah berupaya dalam meningkatkan efisiensi anggaran di masing-masing kabupaten/kota. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien dimana dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang udah direncanakan.

### **Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi atau pusat kepada tingkatan pemerintahan yang ada dibawahnya atau didaerah. Desentralisasi fiskal juga dapat diartikan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi. Singkatnya pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menentukan regulasi terhadap anggaran.

### ***Fiscal Stress***

Tekanan yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan pendapatan anggaran pada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian di daerahnya dapat dikategorikan daerah tersebut mengalami *Fiscal stress* atau tekanan anggaran. Ketersediaan sumber-sumber

daya daerah potensial dan kesiapan sumber daya manusia bagi daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali yang terdiri dari 9 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem dan Kota Denpasar sesuai dengan variabel penelitian diantaranya pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, *fiscal stress* dan kinerja keuangan, dengan pertimbangan bahwa kabupaten/kota Provinsi Bali yang meskipun menerapkan otonomi daerah dengan baik, namun perbedaan pertumbuhan ekonomi dan Disparitas/Kesenjangan pembangunan antar daerah masih tinggi.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data runtut waktu (*time series*) 11 tahun berturut-turut dari tahun 2002 sampai dengan 2012, dan data cross section yang terdiri atas 9 kabupaten/kota, sehingga merupakan *pooled the data* yaitu gabungan antara data *time series* (tahun 2002-2012 : 11 tahun) dengan data cross section 9 kabupaten/kota yang diperoleh dari publikasi Kemenkeu, BPS dan Bappeda masing-masing kabupaten/Kota di Bali.

### **Definisi Operasional Variabel Penelitian**

**1) Pertumbuhan Ekonomi (Y)**

Pertumbuhan Ekonomi Daerah dimaksud dalam penelitian ini adalah PDRB per tahun menurut harga berlaku, yang dinyatakan dalam satuan persen. Pertumbuhan ekonomi (PE) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan formula:

$$PE_{\text{per tahun}} = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

**2) Desentralisasi Fiskal (X<sub>1</sub>)**

Desentralisasi fiskal dimaksud dalam penelitian ini adalah proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah pusat kepada pemerintahan pemerintah daerah. Penggunaan variabel dengan menggunakan formula:

$$DF_{\text{per tahun}} = \frac{PAD + \text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak}}{\text{Realisasi Total Pengeluaran Pemkab/Kot}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

**3) Fiscal stress (X<sub>2</sub>)**

Upaya penerimaan pendapatan yang tinggi mencerminkan tingkat *fiscal stress* yang lebih besar, hal ini berarti bahwa permintaan untuk jasa atau pengeluaran pembangunan tertentu melebihi sumber atau pendapatan yang ada. Menurut Reshovsky (2003), tekanan fiskal (*fiskal stress*) dapat dirumuskan :

$$UPPAD_j = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Potensi PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

**4) Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan dimaksud dalam penelitian ini diproxy melalui rasio efisiensi yang menurut Hamzah (2006) merupakan salah satu rasio yang berpengaruh



signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio ini diukur dengan menggunakan formula:

$$RE_i = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

### Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur atau analisis lintasan merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Pemilihan analisis jalur dengan pertimbangan bahwa bentuk hubungan sebab akibat yang muncul dalam studi ini merupakan model yang kompleks, yaitu adanya variabel yang berperan ganda, sebagai variabel independen pada suatu hubungan, namun menjadi variabel dependen pada hubungan yang lain mengingat adanya hubungan kausalitas yang berjenjang. Hubungan antar variabel penelitian ditampilkan pada gambar 1. Berdasarkan diagram jalur pada Gambar 1 menghasilkan dua persamaan struktural yaitu :

- a) Hubungan antara desentralisasi fiskal ( $X_1$ ) dan *fiskal stress* ( $X_2$ ) terhadap kinerja keuangan ( $X_3$ )

$$X_3 = b_1 X_1 + b_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots(5)$$

- b) Hubungan antara desentralisasi fiskal ( $X_1$ ) dan *fiskal stress* ( $X_2$ ) dan kinerja keuangan ( $X_3$ ) terhadap Y

$$Y = b_3 X_1 + b_4 X_3 + b_5 X_2 + e_2 \dots\dots\dots(6)$$

Keterangan :

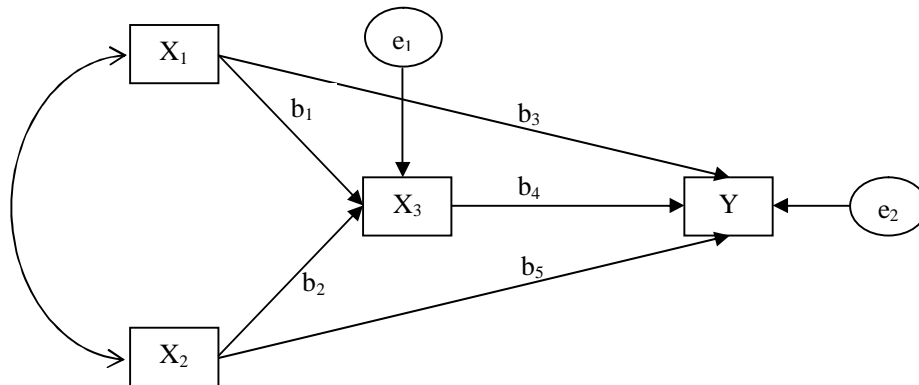
$X_1$  adalah desentralisasi fiskal

$X_2$  adalah *fiscal stress*

$X_3$  adalah kinerja keuangan

Y adalah pertumbuhan ekonomi

$e_2$  adalah error 2



Gambar 1

**Model Path Desentralisasi Fiskal, *Fiscal stress*, Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi**

a) Pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan uji t, sedangkan untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut :

$$z = \frac{ab}{S_{ab}} \dots\dots\dots(4.3)$$

Standar error koefisien a dan b ditulis dengan  $S_a$  dan  $S_b$ , besarnya standar error tidak langsung (indirect effect)  $S_{ab}$  dihitung dengan rumus berikut ini :

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2} \dots\dots\dots(4.4)$$

Keterangan:

a adalah koefisien tak standar pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi

b adalah koefisien tak standar pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen

$S_a$  adalah standar error pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi.

$S_b$  adalah standar error pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Pengaruh langsung antar variabel penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, *fiskal stress*, dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien jalur pada penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan regresi dengan metode regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS terhadap model persamaan struktural 1 dan 2, hasilnya ditampilkan pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa secara langsung variabel desentralisasi fiskal ( $X_1$ ) dan *fiskal stress* ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan ( $X_3$ ), selanjutnya desentralisasi fiskal ( $X_1$ ) dan *fiskal stress* ( $X_2$ ), dan kinerja keuangan ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Hubungan antar variabel penelitian diilustrasikan pada Gambar 2.

**Tabel 2**

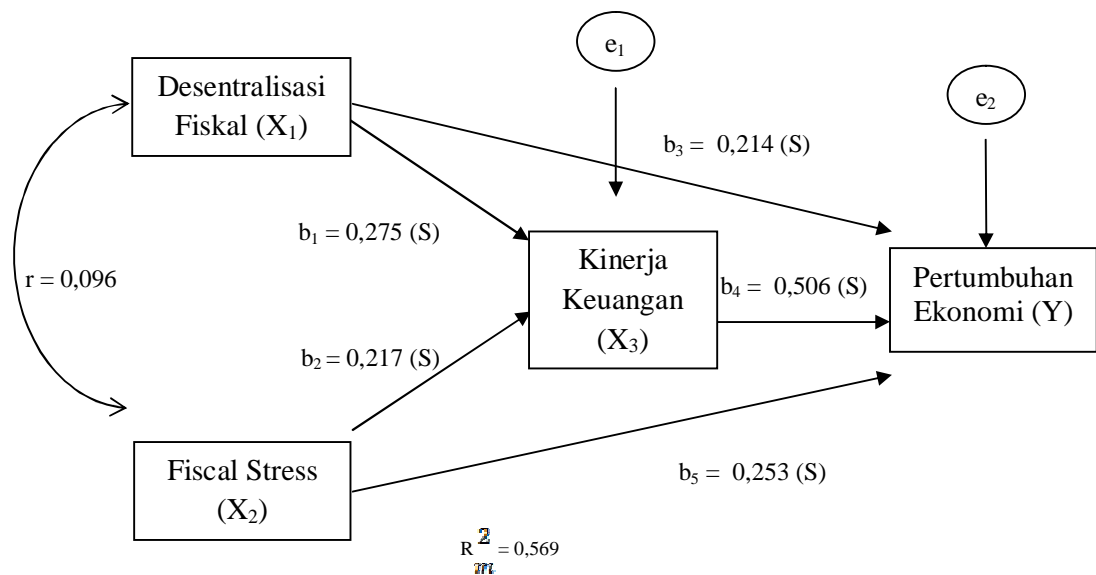
**Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress*, Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

| Regresi               | Koef. Reg. Standar | <i>Standard Error</i> | t hitung | <i>P. Value</i> | Keterangan |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|-----------------|------------|
| $X_1 \rightarrow X_3$ | 0,275              | 0,065                 | 2,878    | 0,005           | Signifikan |
| $X_2 \rightarrow X_3$ | 0,217              | 0,049                 | 2,269    | 0,0025          | Signifikan |
| $X_1 \rightarrow Y$   | 0,214              | 1,100                 | 2,825    | 0,006           | Signifikan |
| $X_2 \rightarrow Y$   | 0,253              | 0,818                 | 3,394    | 0,001           | Signifikan |
| $X_3 \rightarrow Y$   | 0,506              | 1,650                 | 6,514    | 0,000           | Signifikan |

**Sumber: Hasil Penelitian (diolah)**

**Analisis Ketepatan Model**

Salah satu indikator ketepatan model dalam analisis jalur ditunjukkan oleh koefisien determinasi total. Hasil analisis jalur memperoleh koefisien determinasi total sebesar 0,569 dapat disimpulkan bahwa keberagaman data atau variasi data yang dapat dijelaskan oleh model adalah 56,9 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data mampu 56,9 persen dijelaskan oleh model sedangkan sisanya 43,1 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.



**Gambar 2. Diagram Jalur Variabel Hasil Penelitian Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal**

**Stress dan Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

**Pengaruh Tidak Langsung Desentralisasi Fiskal dan Fiscal Stress Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kinerja Keuangan**

Pengujian pengaruh tidak langsung desentralisasi fiskal dan *fiskal stress* terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kinerja keuangan dilakukan melalui uji Sobel, hasilnya disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3**

**Ringkasan Pengujian Pengaruh Tidak Langsung Desentralisasi Fiskal dan  
*Fiscal Stress* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kinerja Keuangan  
Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

| Hubungan Variabel                                       | a     | Sa    | b      | Sb    | z      | Sig   | Keterangan |
|---|-------|-------|--------|-------|--------|-------|------------|
| Pengaruh Desentralisasi Fiskal melalui Kinerja Keuangan | 0,188 | 0,065 | 10,751 | 1,650 | 9,324  | 0,000 | Signifikan |
| Pengaruh Fiscal Stress melalui Kinerja Keuangan         | 0,112 | 0,049 | 10,751 | 1,650 | 12,369 | 0,000 | Signifikan |

**Sumber: Hasil Penelitian (diolah)**

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel kinerja keuangan ( $X_3$ ) mengintervening pengaruh desentralisasi fiskal ( $X_1$ ) dan *fiskal stress* ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y$ ). Hal ini ditunjukkan oleh hasil perhitungan  $z$  dari uji Sobel masing-masing sebesar sebesar 9,324 dan 12,369 yang jauh lebih besar dari nilai tabel sebesar 1,96.

### **Pengaruh Desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan**

Berdasarkan Tabel 2 pengaruh desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal maka kinerja keuangan daerah menjadi meningkat karena kemampuan keuangan daerah untuk dikelola sendiri oleh daerah sehingga daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan secara mandiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam hal ini jelas sekali kaitan langsung antara desentralisasi fiskal dengan kinerja keuangan. Kedepannya pemerintah daerah perlu lebih serius untuk menciptakan desentralisasi fiskal yang lebih baik dalam mengelola keuangannya agar daerah bisa lebih mandiri.

Menurut Hasugian (2006), kebijakan desentralisasi fiskal yang dititikberatkan pada kabupaten/kota, akan memberi keleluasaan daerah untuk melihat dan menentukan skala prioritas pembiayaan pembangunan yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah dan disertai dengan keleluasaan pemerintahan daerah untuk membelanjakan dana alokasi yang diterima. Kewenangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diharapkan memberi

dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.

### **Pengaruh *fiscal stress* terhadap kinerja keuangan**

Berdasarkan Tabel 2 pengaruh *fiscal stress* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Daerah mengalami peningkatan tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang lebih tinggi dibanding era sebelum otonomi. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pada saat *fiscal stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan Akoto, 2004). Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi *fiscal stress*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Setiyawan dan Adi (2006) yang menemukan bahwa *fiscal stress* mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan PAD dan *fiscal stress* mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat pertumbuhan belanja pembangunan/modal. Penelitian serupa dilakukan oleh Purnaninthesa (2006) yang membuktikan bahwa *fiscal stress* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Purnaninthesa (2006) menyimpulkan bahwa *fiscal stress* pada suatu daerah dapat menyebabkan motivasi bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya yang pada akhirnya akan bermuara pada bertumbuhnya perekonomian suatu daerah.



### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun melalui kinerja keuangan daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk pengelolaan keuangan baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dimana pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan dana yang tersedia untuk kepentingan publik/masyarakat atau dana yang tersedia di APBD masih banyak terserap untuk belanja tidak langsung/pegawai sehingga ada program-program pembangunan yang belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Kedepannya kebijakan dalam penyusunan anggaran APBD lebih banyak untuk pembiayaan sektor publik/masyarakat agar hasilnya dapat dirasakan dan menyentuh masyarakat di kabupaten/kota provinsi Bali.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Mahnaz Rabiei & Mazoidi (2012) yang meneliti desentralisasi fiskal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di delapan negara yang mayoritas penduduknya muslim, seperti Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Pada negara-negara tersebut ditemukan bahwa desentralisasi fiskal asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi tiap negara. Peran desentralisasi fiskal asing tercermin dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, transfer teknologi, dan daya saing usaha yang meningkat. Lin dan Liu (2000) yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Pengaruh *Fiskal Stress* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa *fiscal stress* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun melalui kinerja keuangan daerah. Pelaksanaan Undang-Undang otonomi daerah dan Undang-Undang yang membatasi penarikan pajak bagi pendapatan daerah mengakibatkan pemerintah di kabupaten/kota provinsi Bali rata-rata mengalami tekanan keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya rasio realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap target PAD. Dengan indikasi upaya pajak atau dengan kata lain terjadi peningkatan *fiskal stress*. Upaya meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah, adalah suatu tindakan atau usaha pemerintah daerah untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat, giat dan teliti. Upaya yang bisa dilakukan yaitu penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan SDM pengelola pendapatan daerah, meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi, dan menggunakan teknologi IT. Ekstensifikasi pendapatan asli daerah, adalah upaya untuk memperbesar penerimaan dengan cara mengidentifikasi potensi-potensi yang bisa dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayahnya (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Hasil studi ini juga sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Halim (2001) menyimpulkan bahwa *fiscal stress* dapat mempengaruhi anggaran

pendapatan belanja daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pergeseran (kenaikan/penurunan) dari komponen penerimaan dan pengeluaran APBD. Terkait dengan hal itu, Penelitian serupa juga dilakukan oleh Purnaninthesa (2006) menjelaskan bahwa *fiscal stress* pada suatu daerah dapat menyebabkan motivasi bagi daerah untuk meningkatkan PAD nya guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Hal ini memberikan indikasi bahwa dalam tekanan fiskal yang tinggi, daerah cenderung untuk meningkatkan penerimaan daerah sebagai sarana pembiayaan daerah. Salah upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pendapatannya sendiri (dari PAD). Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim (2001) dalam penelitiannya tentang *fiscal stress*, disebutkan bahwa PAD masih berperan terhadap total penerimaan daerah/provinsi.

### **Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan memiliki peran penting dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah setelah otonomi memiliki wewenang mengelola dana yang cukup besar dan apabila tidak dibarengi dengan kinerja keuangan atau efisiensi anggaran maka dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan prioritas pembangunan di daerahnya dan cenderung mengalami pemborosan anggaran. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setiap tahunnya terus meningkatkan efisiensi anggarannya dengan mengeluarkan

kebijakan maupun program dengan prinsip pemerintahan good governance, transparan dan akuntabilitas seperti mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik, regulasi tentang perjalanan dinas luar daerah yang terus diperbaharui, pelelangan barang dan jasa secara elektronik, transparansi anggaran lewat media elektronik, pengawasan dan audit keuangan yang semakin ketat dan kebijakan-kebijakan yang lain sehingga pengeluaran pembangunan yang bersumber dari komponen APBD dapat mendorong laju perekonomian.

## SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil simpulan bahwa desentralisasi fiskal dan *Fiscal Stress* berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kinerja keuangan, dan desentralisasi fiskal, *Fiscal Stress*, dan kinerja keuangan berpengaruh langsung secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara tidak langsung bahwa variabel kinerja keuangan ( $X_3$ ) mengintervening pengaruh desentralisasi fiskal ( $X_1$ ) dan *fiscal stress* ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y$ )

Berdasarkan simpulan diatas, maka disarankan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi untuk meningkat pendapatan atau penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkecil kesenjangan antar daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

- Akai, N dan M Sakata. "Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State Level Cross Section Data for United States". *Journal of Urban Economics*, Vol 52: 93-108, 2002.
- Bahl, Roy W. ,2000. *China Evaluating the impact of Intergovernmental Fiscal reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Edited by Richard
- Bahl, Roy W. and Wallace, Sally,2001, "Fiscal Decentralization: The Provincial-Local Dimension. Fiscal Policy training Program 2001". *Fiscal Decentralization Course* .July 23-Agust, 2001.Atlanta-Georgia.World Bank Institute and Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies.
- Bohte, John dan Kenneth J Meier. 2000. "The Marble Cake : Introducing Federalism to The Government Growth Equation". *Publius*.Summer.Hal : 35 – 99.

- Brodjonegoro, Bambang PS. dan Dartanto, Teguh, 2003. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Daerah :Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan", *Indonesian journal of Economics and Development*, Vol.4 No.1 Juli 2003. Hal. 17-37. Jakarta : FE UI
- Davoodi, H and H. Zou. 1998. "Fiscal Decentralization and Economic Growth : A CrossCountry Study", *Journal of Urban Economic*, 43, 224 – 257
- Dongori, Dessy Patricia F. 2006. *Pengaruh Tekanan Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga
- Emelia, 2006."Mengukur Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dalam Mendorong Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 di Kabupaten Lampung Timur". *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2001. "Analisis Diskriptif Pengaruh *Fiscal stress* pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah". *KOMPAK.STIE YO*. Yogyakarta. Hal:127-146
- Hamza, Ardi, 2006. "Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan : Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur)", *Jurnal Keuangan Daerah*, Vol12 hal 87 – 105, Jakarta.
- Handayani, Atiah. 2009. "Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)". *Tesis*, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.
- Hasugian, Andros M.P. 2006. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kemiskinan di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat. *Skripsi* Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
- Khusaini, Muhamad, 2006, *Ekonomi Publik :Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang : BPFE Unbraw.
- Lin, Justin Yifudan Liu, Zhiqiang. 2000. "Fiscal Decentralization and Economic Growth in China". *Economic Development and Cultural Change*. Chicago. Vol49. Hal :1 – 21.
- Lucyanda, J. 2001. "Hubungan Antara Anggaran Partisipatif dengan Kinerja Manajerial: Peran Locus of Control Sebagai Variabel Moderating dan

- Motivasi Sebagai Variabel Intervening”. *Tesis*. Program Pasca Sarja. UGM: Yogyakarta.
- Mahi, Raksaka, 2001. ”Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar daerah dan Peningkatan Efisiensi”. *Analisa CSISXXIX*, Hal. 54-66, Jakarta: Indonesia Project, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Martinez-Vazquez, Jorge dan Robert M McNab. 2005. “ Fiscal Decentralization, Macrostability and Growth ”. Atlanta, GA :Geogia State University, Andrew YoungSchool of Policy Studies, *International Studies Program Working Paper*, 05-06.
- Mursinto, Djoko, 2004, “Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Pada Era Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur”, *Disertasi*, tidak dipublikasikan. Surabaya :Pascasarjana Unair.
- Nehen, Ketut. 2012. *Perekonomian Indonesia*. Udayana University Press. Denpasar
- Oates, Wallace E. 1993. “Comment on “Conflict and Dillemas of Decentralization” by Rudolf Holmes”. *The World Bank Research Observer*. Hal : 351 – 353.
- Pressman, Steven, 2000, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, Terjemahan Edisi Pertama, Jakarta PT Raja GrafindoPersada.
- Reschovsky, Andrew. 2003. The Implication of State Fiscal Stress for Local Governments. *Fiscal Journal*. Vol 4. No.3.
- Rahyuda, I Ketut, I Gst Wayan Murjana Yasa dan Ni Nyoman Yuliarmita, 2004. *Metodologi Penelitian*. Fakultas Ekonomi unud. Denpasar.
- Riduwan. 2008. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta. Bandung
- Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sadono, Sukirno, 2001. *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan Kebijaksanaan*. Penerbit FE-UI dan Bina Grafika. Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.

**Sang Made Muryawan dan Made Sukarsa, Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress.....**

- Sasana, Hadi, 2006. "Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah", *Dinamika Pembangunan*, Vol 3 No. 2 hal 145-170, Desember 2006.
- Setiyawan, Budi dan Adi, PriyoHari, 2006. "Pengaruh *Fiscal stress* terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli dan Belanja Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah)". *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Shamsub, Hannarong., Joseph B Akoto. 2004. "State and Local Fiscal Structures and *Fiscal stress*". *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Vol 16, No 1 Hal: 40-61.
- Solimun. 2008. *Memahami Metode Kuantitatif Mutakhir : Structure Equation Model dan Partial Least Square*. Brawijaya University Press. Malang
- Sutedi, Adrian. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sujatmoko, Emanuel. 2010. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Diktat Kuliah Kebijakan Fiskal Magister Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya
- Sudirman, I Wayan. 2011. *Kebijakan Fiskal dan Moneter. Teori dan Emperikal*. Kencana. Jakarta
- Suyana Utama, Made. 2012. *Metode Kuantitatif: Buku Ajar*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Swasono, Fauziah. 2007. " Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indonesia ", *Economics and Finance in Indonesia*, Vol. 55(2).
- Todaro, MP. 2003. *Economic Development*. Sixth Edition. Published by New York University.
- Usman, Syaikhu, 2007. "Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah", *Smeru*, halvi, Jakarta.
- Wibowo, Puji, 2008. "Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah", *Jurnal Keuangan Publik*, Vol 5 No. 1 Hal 55-83. Jakarta.
- Wong, John D. 2004. "The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity". *Journal of Public Budgeting., Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3. Hal : 413 – 423
- Xie, D., Zou, H., dan Davoodi, H., 1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States, *Journal of Urban Economics* XLV:228-39.mu